

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan syarat utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas. Keberhasilan suatu pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) tidak terlepas dari pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan aturan. Indonesia sebagai negara yang menerapkan sistem otonomi daerah, memberikan hak dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangannya masing-masing. Setiap daerah yang diberikan hak dan kewenangan tersebut bukan berarti dapat mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki tanpa arah dan tujuan yang jelas. Hak dan kewenangan yang diberikan pada dasarnya merupakan amanah yang harus dipertanggung-jawabkan secara akuntabel dan transparan, baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah pusat (Syahdi & Bijaang, 2018). Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas hak dan kewenangan yang diberikan, maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban atau yang disebut dengan laporan keuangan pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 mendefinisikan laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas

pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah memiliki karakteristik kualitatif yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang meliputi: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Sehingga dengan adanya karakteristik tersebut laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan mampu untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah

Kualitas pelaporan keuangan selalu menjadi perhatian dalam perkembangan termasuk sistem pemerintahan. Kualitas laporan keuangan menjadi penting untuk diperhatikan karena memiliki dampak yang signifikan terhadap pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan (Rizaldi, 2018). Hal tersebut didasarkan pada teori *stewardship* oleh Donaldson dan Davis (1991) yang menyatakan bahwa para manajemen dalam hal ini pemerintah tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori *stewardship* menggambarkan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut maka *stewards* (manajemen dan auditor internal) mengarahkan semua kemampuan untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas.

Kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan pemberian opini dari Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK). Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) merupakan pedoman yang digunakan BPK dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan menyatakan bahwa terdapat empat tingkatan predikat opini yang diberikan oleh BPK yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Capaian opini WTP merupakan ukuran tertinggi dalam penilaian LKPD. Akan tetapi, capaian opini WTP bukan merupakan tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan yang berkualitas pada pemerintah daerah. Dilansir dari siaran pers BPK dalam situs *jatim.bpk.go.id*, Joko Agus Setyono selaku Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menuturkan bahwa Opini WTP yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai 'kewajaran' penyajian laporan keuangan dan bukan merupakan 'jaminan' bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah sudah terbebas dari adanya kesalahan atau tindakan kecurangan lainnya.

**Tabel 1. 1**

**Perkembangan LKPD Kabupaten Gresik Tahun 2019-2021**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Opini BPK</b>
2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI (2022)

LKPD Kabupaten Gresik merupakan salah satu LKPD yang berhasil mendapatkan predikat opini WTP dari BPK pada tahun 2021. Jika dilihat dari tabel diatas, LKPD Kabupaten Gresik berhasil mempertahankan opini WTP selama 7 (tahun) berturut-turut terhitung dari tahun 2015 hingga tahun 2021. Meskipun telah menerima opini WTP, LKPD Kabupaten Gresik masih memerlukan peningkatan kualitas melalui perbaikan dalam pengelolaannya. Terbukti dengan masih adanya beberapa temuan di setiap tahunnya, sebagaimana yang tercantum pada hasil pemeriksaan BPK di tahun terkait.

Pada tahun 2021 hasil pemeriksaan BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada pengelolaan LKPD. Temuan tersebut salah satunya berasal dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik dimana pengelolaan dan penatausahaan aset tetap di Kabupaten Gresik dinyatakan belum terselenggara secara optimal. BPK juga menjelaskan dari temuan tersebut mengakibatkan timbulnya beberapa permasalahan seperti belum terpenuhinya asersi kelengkapan dan penilaian pada penyajian aset tanah, peralatan dan mesin serta adanya potensi kesalahan perhitungan penyusutan aset tetap yang dihitung secara manual. Dari beberapa permasalahan tersebut, menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Gresik belum disajikan secara lengkap dan masih terdapat potensi kesalahan material. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah Kabupaten Gresik dinyatakan belum

dapat memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan yaitu relevan dan andal.

Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dituntut untuk terus melakukan perbaikan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat berkualitas. Bukan hanya menyajikan laporan keuangan secara wajar untuk memperoleh opini WTP saja, akan tetapi laporan keuangan yang disajikan juga sudah terbebas dari adanya kesalahan atau tindakan kecurangan lainnya. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah memiliki sumber daya manusia yang berkompetensi di bidangnya. Tinggi rendahnya kualitas laporan keuangan bergantung pada kualitas dan kompetensi sumber daya manusia yang menyusunnya (Irafah & Sari, 2020). Hal tersebut juga berlaku bagi entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang paham dan memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi pemerintahan. Apabila seseorang memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik maka dia akan bekerja secara maksimal, sesuai dengan prosedur, teliti, dan akurat dalam setiap penyajian laporan keuangan yang dihasilkan. Sumber daya manusia yang handal dalam penyusunan laporan keuangan juga dapat menghemat waktu dalam penyusunan laporan keuangan, karena sumber daya manusia tersebut sudah tahu dan paham apa yang dilakukan dengan baik sehingga laporan keuangan juga dapat disampaikan dengan tepat waktu (Ridzal dkk., 2022)

Faktor selanjutnya yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah teknologi informasi. Pemerintah diwajibkan untuk

mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam peningkatan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan. Kemajuan teknologi informasi saat ini dapat mewujudkan tingkat kecepatan proses pelaporan keuangan sehingga mampu menghasilkan *output* laporan keuangan yang, relevan, handal dan tepat waktu karena dengan memanfaatkan teknologi informasi, proses penyusunan dan pelaporan keuangan dapat lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan proses manual (Sari, 2022). Laporan keuangan pemerintah daerah membutuhkan teknologi dalam memproses transaksi dengan perhitungan yang akurat melalui sistem dan mempublikasikannya dengan menggunakan jaringan agar mudah di akses oleh masyarakat.

Selain kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal juga merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian adanya kesalahan dan penyalahgunaan terutama dalam penyusunan laporan keuangan (Rahayu, 2020). Sistem pengendalian intern pemerintah dirancang untuk memberikan jaminan bahwa tujuan pemerintah daerah dapat dicapai melalui efisiensi dan efektivitas operasi, reabilitas penyajian laporan keuangan yang dapat

dipercaya, dan ketaatan terhadap undang-undang serta kebijakan yang berlaku yang tercermin dari keterandalan laporan keuangan (Ayuningtyas dkk., 2022)

Penelitian terkait dengan topik yang sama telah banyak dilakukan. Akan tetapi, tidak semua penelitian tersebut menunjukkan tingkat signifikan yang sama. Irafah & Sari (2020) dalam penelitiannya tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, peran internal audit, dan kesuksesan penerapan sistem informasi keuangan daerah pada kualitas LKPD menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas LKPD. Hal ini sejalan dengan penelitian Ridzal dkk., (2020) tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas LKPD yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas LKPD. Sementara itu, hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Sa'adah & Nasrullah, (2021) tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas LKPD yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD.

Hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas LKPD juga memiliki hasil yang bervariasi. Sari (2022) dalam penelitiannya tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kualitas aparatur pemerintah daerah, *good governance* dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas LKPD menyimpulkan

bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas LKPD. Hasil yang sama juga diperoleh Fitri & Alam (2022) dalam penelitiannya tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD. Tetapi tidak sepenuhnya pemanfaatan teknologi informasi berperan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Ismunawan & Septyani (2020) dalam penelitiannya tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD.

Hasil penelitian terdahulu terkait sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas LKPD juga memiliki hasil yang berbeda-beda. Rumangun dkk., (2021) dalam penelitiannya tentang pengaruh kepatuhan perundang-undangan dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas LKPD menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas LKPD. Hal ini sejalan dengan penelitian Mardani & Suhartono (2019) tentang pengaruh sistem informasi keuangan dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap terhadap kualitas LKPD yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal (SPI) berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas LKPD. Sementara itu, penelitian Putra & Halmawati (2022) tentang pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, komitmen organisasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas LKPD menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh



terhadap kualitas LKPD. Beberapa hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa ketiga determinan penelitian yaitu kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal pemerintah tidak selalu memberikan pengaruh yang sama terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Mulia (2019) yang menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut juga menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar menambahkan variabel lain dalam mengukur kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, peneliti menambahkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel tambahan yang akan diuji dalam penelitian ini. Pemilihan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel tambahan dirasa menarik karena teknologi informasi memberikan kemudahan dalam menghemat waktu dan akurat dalam mengolah data, sehingga pelaporan keuangan pemerintah daerah dapat disajikan secara tepat waktu dan terhindar dari kesalahan yang diakibatkan oleh *human error*. Perbedaan lainnya terletak pada objek yang diteliti. Peneliti menetapkan BPPKAD Kabupaten Gresik sebagai objek penelitian dikarenakan pada instansi tersebut ditemukan adanya temuan yang

menyatakan bahwa pengelolaan dan penatausahaan aset tetap di Kabupaten Gresik belum terlaksana secara optimal.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai fenomena yang terjadi khususnya terkait dengan predikat opini yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, serta adanya temuan pada instansi terkait dan didukung oleh adanya perbedaan hasil penelitian (*inconsistency result*) dari hasil penelitian sebelumnya maka menjadi pendorong bagi peneliti untuk melakukan penelitian kembali agar dapat menguji secara lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan di BPPKAD pemerintah daerah Kabupaten Gresik. Oleh karena itu, didasarkan dari penjelasan sebelumnya maka peneliti mengambil judul **“Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik”**

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

3. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

### **1.3. Tujuan penelitian**

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini berkontribusi terhadap implementasi teori *stewardship* yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai *steward* memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap aktivitas dalam organisasi termasuk penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas dapat dicapai melalui kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kualitas laporan keuangan, seperti peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah.